



**PENETAPAN**

Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

**Armina Wati**, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.10, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, 11 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Nnk, tanggal 11 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama **ARMINA WATI** Lahir di **Maumere** , pada tanggal **07 Oktober 1978** ;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal **25 Agustus 2005** dengan **Nomor : AA 486433** yang di terbitkan oleh **Kantor Imigrasi Nunukan** tercantum identitas atas nama : **ARMINAWATI PETRUS** yang di lahirkan di Maumere, 07 Oktober 1978 ;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan permohonan paspor pada tanggal **10 Desember 2024** pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang pemohon tersebut , akan tetapi terdapat perbedaan identitas **Nama**, pada paspor pemohon yang di ajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan paspor;
4. Bahwa ternyata Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat di proses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang

Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa atas nama **ARMINAWATI PETRUS** yang di lahirkan di Maumere pada tanggal kelahiran **07 Oktober 1978** sebagaimana tercantum dalam paspor **Nomor : AA 486433** adalah identik (orang yang sama) dengan **Nama ARMINA WATI** Lahir di Maumere Pada tanggal **07 Oktober 1978** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405 CLT21102010014727 ;**

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi Tawau **Malaysia** serta ingin melakukan perbaikan data paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan;
6. Bahwa Pemohon dengan ini kami ajukan Bukti bukti sebagai berikut;
  - a. Foto copy sesuai dengan Aslinya Tanda Penduduk (KTP) disertai Materai cukup.
  - b. Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan Aslinya dan disertai Materai cukup ;
  - c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai Aslinya disertai Materai cukup ;
  - d. Foto copy Paspor sesuai dengan Alinya diberi materai cukup dan dilegalisasi

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **ARMINA WATI** Lahir di : **Maumere** pada tanggal **07 Oktober 1978** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405 CLT21102010014727** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan **Nama ARMINAWATI PETRUS Tempat lahir di Maumere, 07 Oktober 1978** sebagaimana tercantum pada **Paspor Nomor : AA 486433** adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405094710780002, atas nama ARMINA WATI, yang dikeluarkan oleh

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 2 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6503091306240004, atas nama kepala keluarga ARMINA WATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6405CLT21102010014727, atas nama ARMINA WATI, yang lahir di Maumere pada tanggal 07 Oktober 1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspur Republik Indonesia Nomor: AA 486433 atas nama ARMINAWATI PETRUS, yang lahir di Maumere pada tanggal 07 Oktober 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 25 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-4; Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang mana keterangan para saksi tersebut telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Musrifah.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspur dengan Nomor AA 486433, yang masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sehingga Pemohon mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor ke Kantor Imigrasi Nunukan, tetapi ditolak karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan identitas yang ada pada paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis dengan nama Armina Wati, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978, sedangkan di dalam Paspur milik Pemohon tertulis dengan nama Arminawati Petrus, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan nama Pemohon yang

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 3 dari 10*



tertulis di dalam paspor Pemohon terdapat kekeliruan;

- Bahwa kekeliruan penulisan nama Pemohon pada paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang menggunakan data yang tidak benar pada saat pengurusan paspor tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan nama Pemohon karena Pemohon memperlihatkan kepada Saksi Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon tersebut adalah merujuk ke satu orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Kartini.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor AA 486433, yang masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sehingga Pemohon mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor ke Kantor Imigrasi Nunukan, tetapi ditolak karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan identitas yang ada pada paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis dengan nama Armina Wati, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama Arminawati Petrus, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di dalam paspor Pemohon terdapat kekeliruan;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama Pemohon pada paspor tersebut

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 4 dari 10*



disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang menggunakan data yang tidak benar pada saat pengurusan paspor tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan nama Pemohon karena Pemohon memperlihatkan kepada Saksi Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon tersebut adalah merujuk ke satu orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tentang penetapan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisasi, yang kemudian diberi tanda P-1 hingga P-4, kemudian fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, sehingga secara formil alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu saksi Musrifah dan saksi Kartini, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga secara formal keterangan saksi tersebut merupakan alat

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 5 dari 10*



bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa atas nama **ARMINA WATI** Lahir di : **Maumere** pada tanggal **07 Oktober 1978** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405 CLT21102010014727** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan **Nama ARMINAWATI PETRUS** Tempat lahir di **Maumere, 07 Oktober 1978** sebagaimana tercantum pada **Paspor Nomor : AA 486433** adalah satu orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 6 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai *yurisdiksi voluntair* sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa identitas Pemohon tertulis dengan nama Armina Wati, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978, sedangkan pada bukti surat P-4 berupa Paspor, diketahui identitas Pemohon tertulis dengan nama Arminawati Petrus, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 7 dari 10*



diuraikan di atas, maka dapat diketahui adanya perbedaan nama Pemohon, yang mana perbedaan identitas tersebut membuat Pemohon kesulitan untuk mengurus pembuatan paspor baru sebagaimana diuraikan Pemohon dalam uraian posita surat Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sedangkan nama sebagaimana tertulis di dalam paspor milik Pemohon merupakan identitas yang keliru yang disebabkan oleh kesalahan/ketidackermatan Pemohon yang memberikan data yang tidak benar kepada pihak Kantor Imigrasi Nunukan pada saat pengurusan pembuatan paspor tersebut, tetapi identitas yang berbeda tersebut pada hakikatnya merujuk ke satu orang yang sama, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan foto P-4 berupa Paspor, dimana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa identitas Pemohon, yaitu Armina Wati, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT21102010014727, dengan nama Arminawati Petrus, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978, sebagaimana yang tercantum dalam paspor Nomor AA 486433, merupakan satu orang yang sama, yakni Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pembuatan Paspor, dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, bahwa oleh

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 8 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **Armina Wati**, lahir di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6405CLT21102010014727, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama **Arminawati Petrus**, yang dilahirkan di Maumere pada tanggal 7 Oktober 1978, sebagaimana yang tercantum dalam paspor Nomor AA 486433, adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Nardon Sianturi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 9 dari 10*



Hernandia Agung Permana, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)  
sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nnk, halaman 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)